



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GANJAR PRIYATNO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 1005865

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.080.000.000**

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah Seluas 19250 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 100000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA
, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 585 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **132.000.000**

1. MOBIL, HONDA HONDA MOBILIO DD415EMCVTCKD Tahun
2015, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA A5C02R37M2M/T Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA A1F02N36M1A/T Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **20.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 1.232.000.000

III. HUTANG

Rp. 290.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 942.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.